

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pendidikan adalah suatu proses belajar – mengajar yang dilakukan dengan sengaja, sadar dan berencana yang membiasakan para warga masyarakat sedini mungkin untuk menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati serta mengamalkan nilai-nilai yang disepakati bersama sebagai terpuji, dikehendaki serta berguna bagi kehidupan dan perkembangan pribadi masyarakat, bangsa dan negara.

Salah satu pokok masalah yang dihadapi bangsa ini untuk memasuki era globalisasi adalah kondisi Sumber daya manusia (SDM) yang relatif rendah yang dicermati dari pemilikan latar pendidikannya. Peningkatan kualitas SDM menjadi perhatian semua pihak, terlebih dalam suasana krisis multidimensi yang terjadi saat ini, masyarakat membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk menghadapi persaingan bebas. Untuk itu pendidikan memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini para peraku pembangunan pendidikan berupaya untuk menaikkan derajat mutu pendidikan Indonesia agar dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja dengan menyesuaikan pembangunan pendidikan itu sendiri.

Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan dari pembangunan adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu dalam pembangunan tersebut pendidikan memegang peranan penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

dan pemerintah mempunyai kewajiban dalam melaksanakan setiap kebijakan pendidikan yang diambil untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional tersebut, sehingga arah kebijakan pendidikan menjadi bagian dari upaya dalam melaksanakan amanat yang terkandung dalam UUD 1945.

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dilihat dari fungsi dan tujuannya, Standar Nasional Pendidikan memiliki fungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, dan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional telah diterapkan, bahwa pengembangan pendidikan di Indonesia yang beragam mengacu pada Sistem Nasional Pendidikan (PP. No. 19/2005). Kehadiran Peraturan Pemerintah

No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dapat dipandang sebagai tonggak penting untuk menuju pendidikan nasional yang terstandarkan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dikatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan lingkup terdiri 8 standar, yaitu: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan (Mulyasa, 2008)

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 mengamanatkan segera tersusunnya kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan mengacu kepada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Kurikulum yang diberlakukan sekarang yaitu kurikulum tingkat satuan pengajaran (KTSP), KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pengajaran (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional standar

nasional pendidikan terdiri atas standar isi (SI), proses, kompetensi lulusan (SKL), tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar pendidikan nasional tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum (Dirjen Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan : 2008)

Pengembangan kurikulum dilakukan oleh guru, kepala sekolah dan dewan pendidikan. Namun masih banyak guru belum terbiasa mengembangkan kurikulum sekolah, karena mereka sendiri tidak memahami kurikulum seperti yang dikemukakan oleh Mulyasa (2008)

Judisseno (2008: 20) berpendapat bahwa, lembaga pendidikan merupakan pihak yang bertanggungjawab menciptakan dan menyuplai tenaga kerja bagi industri. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dituntut untuk memberikan SDM yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan industri. Dalam kaitan ini, lembaga pendidikan harus menciptakan SDM yang kompeten dan organisasi bisnis harus mampu mendefinisikan kompetensi apa yang dibutuhkan. Keduanya harus saling bersinergi dalam suatu kemitraan yang tak putus-putusnya dan secara konsisten dapat mendefinisikan dan menciptakan pola tenaga kerja yang kompeten pada bidang masing-masing.

Pendidikan kejuruan sebagai salah satu bagian dari sistem Pendidikan Nasional memainkan peran yang sangat strategis bagi terwujudnya angkatan tenaga kerja nasional yang terampil. Karena setiap lulusan SMK memang

ditempah untuk menjadi sumber daya manusia yang siap pakai, dalam arti ketika mereka telah menyelesaikan sekolahnya lulusan SMK tersebut dapat menerapkan ilmu yang telah mereka dapat sewaktu di sekolah.

Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan pada dasarnya adalah untuk menghasilkan lulusan yang siap untuk dipekerjakan di perindustrian dan bidang usaha lainnya. (Reksoatmodjo, 2010).

Tantangan era globalisasi saat ini menuntut adanya kesiapan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Dengan jumlah angkatan tenaga kerja yang besar, diharapkan benar-benar mampu menyesuaikan diri agar dapat memiliki keunggulan yang kompetitif.

Huges sebagaimana dikutip oleh Soeharto (1988:1) mengemukakan *vocational education* (pendidikan kejuruan) adalah pendidikan khusus yang program-programnya atau materi pelajarannya dipilih untuk siapapun yang tertarik untuk mempersiapkan diri bekerja sendiri, atau untuk bekerja sebagai bagian dari suatu grup kerja.

Sejalan dengan pendapat tersebut Evans sebagaimana dikutip Muliati (2007:7) mengemukakan pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lain. Hamalik (1990:24), mengemukakan pendidikan kejuruan adalah suatu bentuk pengembangan bakat, pendidikan dasar keterampilan dan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja yang dipandang sebagai latihan keterampilan. Djohar (2007:1285) mengemukakan pendidikan kejuruan adalah

suatu program pendidikan yang menyiapkan individu peserta didik menjadi tenaga kerja yang profesional. Ditegaskan oleh Byram dan Wenrich (1956:50) bahwa “*vocational education is teaching people how to work effectively*”. Secara lebih spesifik Wenrich sebagaimana dikutip Soeharto (1988:2) mengemukakan pendidikan kejuruan adalah seluruh bentuk pendidikan persiapan untuk bekerja yang dilakukan di sekolah menengah.

SMK sangat erat kaitannya dengan dunia usaha atau dunia kerja, karena siswa SMK disiapkan untuk langsung bekerja setelah lulus, program pembelajaran di SMK dirancang dengan memberikan porsi lebih pada praktek kerja. Dengan pola kemitraan tersebut siswa SMK dapat mengikuti program magang, praktek kerja lapangan ataupun prakerin (praktek kerja industri) pada dunia usaha yang telah maju, sehingga terjadi *Link and Mach* antara kurikulum dengan kemajuan dunia usaha. Dalam program magang tersebut yang ditekankan kepada siswa adalah sikap disiplin. Siswa harus melihat program magang sebagai suatu kesempatan untuk benar - benar membekali diri dengan keterampilan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja, sehingga siswa harus berdisiplin diri dan memanfaatkan kesempatan tersebut semaksimal mungkin dan tidak bisa bersikap *take it for granted* (menganggap enteng).

Secara konsep peran pendidikan kejuruan sudah berjalan dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih perlu banyak perbaikan. Namun karena kelebihan sekolah kejuruan yang memberikan peluang bagi siswa untuk mendalami satu disiplin ilmu tentunya memberikan peluang yang lebih besar untuk memasuki dunia kerja setelah lulus sekolah, karena benar-

benar telah siap dengan pendalaman ilmu serta keterampilan yang telah diperolehnya tersebut dapat langsung diberdayakan.

Namun kualitas hasil belajar di SMK yang masih rendah merupakan masalah yang sering dibicarakan dalam dunia pendidikan saat ini, sehingga guru berupaya untuk meningkatkan hasil belajar dengan mengembangkan bahan ajar yang digunakan (Sunarni, 2010).

Rendahnya kualitas lulusan mungkin karena adanya kendala – kendala maupun kekurangan – kekurangan baik dalam penyusunan Silabus, RPP (Rencana Program Pembelajaran) serta kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran, dan lain-lain.

Oleh karena ilustrasi diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut terhadap kendala – kendala yang muncul dalam pelaksanaan kurikulum di SMK berbasis kimia dengan judul **“Analisis Implementasi Kurikulum SMK Kimia dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah implementasi kurikulum SMK kimia sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri?
2. Apakah ada hambatan – hambatan dalam pelaksanaan kurikulum SMK kimia?

3. Apakah SMK kimia memiliki hubungan kerja dengan dunia usaha dan dunia industri?
4. Apakah lulusan SMK kimia merupakan tenaga kerja yang terampil dalam dunia usaha dan dunia industri?

### **1.3. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehubungan dengan keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki peneliti, maka diperlukan pembatasan masalah dalam penelitian yaitu:

1. SMK Negeri yang memiliki bidang keahlian kimia di kota Medan dengan melihat kondisi sekolah (sarana dan prasarana) dan wilayah sekolah
2. Analisis melihat kurikulum, proses PBM, hambatan-hambatan PBM, kompetensi lulusan, tenaga pendidik, sarana dan prasarana
3. Analisis hubungan kerjasama antara SMK kimia dan lulusannya dalam dunia usaha dan dunia industri

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti mencoba mengemukakan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kurikulum SMK kimia dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri?
2. Apakah hambatan – hambatan pelaksanaan kurikulum SMK kimia?
3. Apakah SMK kimia memiliki hubungan kerja dengan dunia usaha dan dunia industri?



4. Apakah lulusan SMK kimia merupakan tenaga yang siap pakai dalam dunia usaha dan dunia industri?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kurikulum SMK kimia dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
2. Untuk mengetahui proses pembelajaran dan hambatan–hambatannya pembelajaran SMK kimia
3. Untuk mengetahui SMK kimia memiliki hubungan kerja dengan dunia usaha dan dunia industry
4. Untuk mengetahui lulusan SMK kimia merupakan tenaga yang siap pakai untuk bekerja.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan sehubungan dengan dunia Pendidikan di Indonesia sehingga SDM Indonesia dapat bersaing pada era globalisasi khususnya masalah ketenagakerjaan.
2. Sebagai bahan masukan bagi Sekolah Menengah Kejuruan agar materi/pelajaran relevan dengan kurikulum pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga bermanfaat bagi siswa dalam menggeluti dunia usaha dan dunia industri.